

PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL DAN KORUPSI TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI PROVINSI BALI

Ida Bagus Yudistira
I Made Jember

Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul pengaruh desentralisasi fiskal dan korupsi terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali. Ditemukan hasil bahwasanya simultan variabel bebas yaitu desentralisasi fiskal dan korupsi berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat yaitu pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali. Hal ini dapat dilihat dari nilai F hitung yang lebih besar dari F tabel yaitu sebesar 14,318. Secara parsial desentralisasi fiskal tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali. Secara parsial korupsi tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui pengaruh desentralisasi fiskal dan korupsi terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali. Penelitian ini dilakukan di Provinsi Bali. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda.

Kata Kunci : Desentralisasi Fiskal; Korupsi; Pertumbuhan Ekonomi

ABSTRACT

This research's title is determine the effect of fiscal decentralization and corruption on economic growth in the province of Bali. It was found that simultaneous independent variables are fiscal decentralization and corruption significant effect on the dependent variable is economic growth in the province of Bali. It can be seen from the calculated F value greater than the F table that is equal to 14.318. Partially fiscal decentralization does not affect the economic growth in the province of Bali. Partially corruption does not affect the economic growth in the province of Bali. The purpose of this study was to determine the effect of fiscal decentralization and corruption on economic growth in the province of Bali. This research was conducted in the province of Bali. Data analysis techniques used in this research is multiple linear regression.

Keywords : Fiscal Decentralization; Corruption; Economic Growth

PENDAHULUAN

Pembangunan dalam arti luas dapat dipandang sebagai suatu proses multi-dimensional yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap-sikap masyarakat dan institusi-institusi nasional, disamping tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi penanganan ketimpangan pendapatan dan pengentasan kemiskinan (Manurung, 2000). Salah satu indikator kemajuan pembangunan adalah pertumbuhan ekonomi, indikator ini pada dasarnya mengukur kemampuan suatu negara untuk memperbesar outputnya dalam laju yang lebih cepat daripada tingkat pertumbuhan penduduknya (Todaro, 2004).

Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional (Anggeraini, 2012).

Sejarawan, pakar ahli politik dan ekonom telah lama terlibat tentang diskusi apakah korupsi membahayakan pertumbuhan ekonomi (Brodjonegoro, 2002). Lemahnya birokrasi dan penegakan hukum sebagai penyebab utama adanya korupsi. Korupsi sepertinya telah menjadi budaya turun temurun di negeri Indonesia. Korupsi lebih dari sekedar pencarian keuntungan yang bersifat individu dan juga sudah menjadi trend perilaku umum (Zwika, 2008). Korupsi adalah perilaku pejabat publik, baik politikus maupun pegawai negeri, yang secara semena-mena dan tidak legal memperkaya diri sendiri, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka.

Indonesia sudah mendapat predikat negara paling korup dari 41 negara yang disurvei dari *corruption perception index* (CPI) dengan skor CPI 1,94 (skala 0-10). Selepas Orde Baru, optimisme untuk memberantas korupsi muncul dengan didirikannya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2003 (Maulani, 2010). Namun dengan didirikannya lembaga tersebut dan sudah bekerja keras selama kurang lebih satu dekade, persepsi korupsi di Indonesia masih saja buruk. Sehingga hal tersebut menjadi salah satu faktor penghambat pertumbuhan ekonomi.

Menurut hasil survey, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) adalah instrumen pengukuran tingkat korupsi berdasarkan persepsi di negara-negara seluruh dunia yang dikeluarkan oleh Transparansi Internasional. Dengan melihat perbandingan IPK yang diperoleh maka dapat ditinjau apakah negara tersebut sebuah negara yang korup atau tidak. Indeks pengukuran memiliki skala antara 0 (sangat korup) sampai dengan 10 (sangat bersih).

Dampak korupsi bagi negara-negara dengan kasus korupsi berbeda-beda bentuk, luas dan akibat yang ditimbulkannya, walaupun dampak akhirnya adalah menimbulkan kesengsaraan masyarakat sendiri (Kuncoro, 2009). Di negara miskin mungkin korupsi dapat menghalangi perkembangan ekonomi, menurunkan pertumbuhan ekonomi dan mengikis keabsahan politik yang akan berdampak pada memburuknya kemiskinan dan ketidakstabilan politik, sedangkan di negara maju mungkin korupsi tidak terlalu berpengaruh terhadap perekonomian negaranya, tetapi korupsi di negara maju juga dapat mengikis keabsahan politik di negara demokrasi yang maju dan memiliki pengaruh penting bagi negara-negara yang sedang mengalami transisi seperti negara Indonesia, apabila korupsi tidak dihentikan, korupsi dapat menghancurkan ekonomi pasar dan dukungan terhadap demokrasi (Kimberly, 1999).

Pada sektor swasta, korupsi meningkatkan biaya bisnis melalui harga dari suap itu sendiri, biaya manajemen dari negosiasi dengan pejabat dan resiko dari pelanggaran kesepakatan. Meskipun beberapa orang mengklaim, bahwa korupsi menurunkan biaya dengan adanya pemotongan birokrasi (Bird, 2000). Banyaknya kasus korupsi yang justru dilakukan oleh aparaturnegara, mulai dari gubernur, bupati, walikota, anggota DPRD, hingga pejabat dinas telah mencoreng dan mencederai makna desentralisasi di tengah ekspektasi masyarakat bahwa otonomi daerah diharapkan mampu melahirkan pelayan publik (*public services*) yang baik terhadap masyarakat (Mauro, 1995).

Selain korupsi, desentralisasi fiskal juga dapat mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi pada suatu daerah. Dengan adanya desentralisasi fiskal justru membuat kecenderungan tingkat korupsi di daerah meningkat dengan tajam (Rinaldi, 2007). Oleh sebab itu, tidak salah muncul pendapat bahwa efek desentralisasi fiskal yang paling kelihatan justru korupsi, bukan pelayanan publiknya (Hidayat, 2005). Derajat desentralisasi Provinsi Bali dapat dilihat pada Tabel 1 berikut :

Tabel 1 Derajat Desentralisasi Provinsi Bali Periode 2001-2011

No	Tahun	Perumbuhan Ekonomi Di Provinsi Bali	Indeks Persepsi Korupsi	Derajat Desentralisasi
1	2001	5,12	4,33	0,52
2	2002	5,03	5,25	0,53
3	2003	5,31	5,55	0,63
4	2004	5,83	5,56	0,69
5	2005	6,05	5,58	0,70
6	2006	5,88	5,68	0,64
7	2007	6,60	5,69	0,61
8	2008	6,83	5,81	0,64
9	2009	6,53	6,00	0,62

10	2010	6,57	6,26	0,63
11	2011	6,77	6,71	0,65

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, 2012

Tabel 1 menunjukkan bahwa korupsi di Bali stabil karena IPK (Indeks Persepsi Korupsi) 4 ke atas. Suatu negara dikatakan bersih dari korupsi jika IPK-nya 10. Hal itu berarti bahwa Bali masih sulit untuk keluar dari jeratan korupsi yang sudah mengakar, bila dilihat dari pertumbuhan ekonominya, maka pertumbuhan ekonomi di Bali relatif tinggi. Dengan demikian bisa dikatakan bahwa korupsi di Bali tinggi tetapi dengan tingkat pertumbuhan ekonominya yang relatif tinggi juga. Tabel 1 juga menunjukkan bahwa derajat desentralisasi tertinggi terjadi pada tahun 2005.

Desentralisasi merupakan sebuah instrumen untuk mencapai salah satu tujuan bernegara, terutama memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan menciptakan proses pengambilan keputusan publik yang lebih demokratis (Muana, 2005). Dengan desentralisasi akan terwujud pelimpahan wewenang kepada tingkat pemerintahan yang lebih rendah untuk melakukan pembelanjaan, kewenangan untuk memungut pajak (*taxingpower*), terbentuknya Dewan yang dipilih oleh rakyat, kepala daerah yang dipilih oleh DPRD, dan adanya bantuan dalam bentuk transfer dari pemerintah pusat (Siddik, 2002).

Dalam konteks Negara berkembang, Keith (2005) menjelaskan bahwa sedikitnya ada tiga alasan utama mengapa sebagian besar Negara berkembang menganggap penting untuk mengaplikasikan desentralisasi fiskal, yaitu : untuk memperluas otonomi daerah dan untuk menciptakan efisiensi penyelenggaraan administrasi pemerintah serta pada beberapa kasus sebagai strategi untuk mengatasi instabilitas politik. Senada dengan itu Hirawan (2007) menyatakan bahwa otonomi daerah sebagai landasan dari pelaksanaan desentralisasi adalah untuk memenuhi tujuan demokratisasi dan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dimana artinya kebijakan desentralisasi ini dimaksudkan untuk menciptakan proses pengambilan keputusan publik yang demokratis dan memberikan pelayanan masyarakat yang jauh lebih baik.

Tujuan penelitian ini dilakukan adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk mengetahui pengaruh desentralisasi fiskal dan korupsi secara simultan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali.
- 2) Untuk mengetahui pengaruh desentralisasi fiskal dan korupsi secara parsial terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali.

METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian dilakukan di Provinsi Bali, dengan melakukan pendataan terhadap desentralisasi fiskal, korupsi dan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali. Objek penelitian ini adalah desentralisasi fiskal, korupsi dan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali.

Data kualitatif dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) serta data kuantitatif dalam penelitian ini data yang berbentuk angka seperti tingkat korupsi dan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali. Data sekunder dalam penelitian ini berupa, penelitian sebelumnya, dan data-data pendukung dalam penelitian ini.

Data-data yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan metode pengumpulan data observasi non perilaku. Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linear berganda. Persamaan hasil analisis regresi linier berganda dalam penelitian ini adalah:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e \dots\dots\dots (1.1)$$

Keterangan :

Y = Pertumbuhan Ekonomi (persen)

X₁ = Desentralisasi Fiskal (persen)

X_2 = Korupsi (persen)
 e = error

Hipotesis pada penelitian ini diuji dengan menggunakan uji simultan (F-test) dan uji parsial (t-test) untuk mengetahui pengaruh antar variabel. Uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji normalitas, uji heterokedastisitas, uji multikolinearitas dan uji autokorelasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1) Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis ini digunakan mengetahui besarnya pengaruh variabel desentralisasi fiskal (X_1) dan korupsi (X_2) terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali (Y). Tabel 2 berikut merupakan hasil analisis regresi linier berganda.

Tabel 2. Rangkuman Hasil Penelitian

Variabel	Koefisien Regresi		t	Sig
	B	Std. error		
(constant)	3,184	1,748	1,882	0,102
Desentralisasi Fiskal (X_1)	-0,005	0,003	-1,640	0,135
Korupsi (X_2)	0,590	0,226	2,218	0,054
Dependen variabel	: Pertumbuhan Ekonomi			
F Statistik	: 14,318			
Sig F	: 14,318			
R^2	: 0,761			
Adjusted R^2	: 0,708			

Sumber : Data diolah, 2014

Persamaan berikut adalah hasil analisis regresi linier berganda dalam penelitian ini

$$Y = 3,184 + (-0,005X_1) + 0,590X_2$$

$$R^2 = 0,761$$

$$F \text{ hitung} = 14,318$$

Berdasarkan persamaan tersebut diketahui F hitung model regresi sebesar 14,318. Oleh karena F hitung lebih besar dari F tabel = 3,83 maka dapat dikatakan bahwa Desentralisasi Fiskal, dan Korupsi secara serempak berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Bali.

Nilai $R^2 = 0,761$ memiliki arti bahwa 76,1 persen Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Bali (Y) dipengaruhi oleh Desentralisasi Fiskal (X_1) dan Korupsi (X_2), sedangkan sisanya 23,9 persen dipengaruhi oleh faktor lainnya yang tidak masuk dalam model penelitian.

Berdasarkan persamaan tersebut dapat diketahui bahwa desentralisasi fiskal memiliki nilai t hitung sebesar -1,640. Angka tersebut menjelaskan bahwa desentralisasi fiskal tidak berpengaruh secara parsial terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali, dimana t hitung lebih besar daripada t tabel = -2,262. Hal ini berarti semakin tinggi desentralisasi fiskal, maka pertumbuhan ekonomi akan semakin menurun, penelitian ini sejalan dengan Liu.Liu (2000) menyatakan bahwa desentralisasi fiskal tidak sepenuhnya dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah, hal ini dikarenakan di beberapa daerah desentralisasi fiskal sangat menentukan tinggi rendahnya investasi yang dimiliki daerah tersebut. Tanzi (1995) menyatakan bahwa desentralisasi fiskal yang dimiliki tiap daerah tidak berdampak besar bagi pertumbuhan ekonomi suatu daerah, hanya beberapa daerah yang siap untuk melakukan desentralisasi fiskal saja yang dapat menumbuhkan ekonomi daerahnya tersebut.

Berdasarkan persamaan tersebut dapat diketahui bahwa korupsi memiliki nilai t hitung sebesar 2,218. Angka tersebut menjelaskan bahwa korupsi tidak berpengaruh secara parsial terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali, dimana t hitung lebih kecil daripada t tabel = 2,262. Hal ini berarti semakin tinggi korupsi, maka pertumbuhan ekonomi akan semakin meningkat. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Stoker (1987), Wong (2004) dan Prud'homme (2013). Di dalam rezim dengan kualitas lembaga politik tinggi, korupsi berpengaruh negatif tetapi jika kualitas lembaga politik rendah, korupsi tidak mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

2) Hasil Uji Normalitas

Persamaan tersebut menunjukkan bahwa residual model terdistribusi normal. Hal ini dapat ditunjukkan oleh nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,997 yang lebih besar dari 0,1 sehingga data menjadi layak untuk digunakan lebih lanjut. Tabel 3 berikut menunjukkan hasil uji normalitas

Tabel 3. Hasil Uji Normalitas

		Unstandardize d Residual
N		12
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.35004567
Most Extreme Differences	Absolute	.115
	Positive	.092
	Negative	-.115
Kolmogorov-Smirnov Z		.398
Asymp. Sig. (2-tailed)		.997

Sumber : Data diolah, 2014

3) Hasil Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel-variabel bebas (independen) (Ghozali, 2011). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antara variabel bebas. Hasil penelitian menunjukkan tidak terjadi gejala multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi tersebut karena nilai dari *tolerance* dan *VIF* masing-masing menunjukkan nilai *tolerance* yang dimiliki seluruh variabel bebas lebih besar dari 0,10 dan nilai *VIF* yang dihasilkan kurang dari 10 dan ditunjukkan dengan tabel 4.

Tabel 4. Hasil Uji Multikolinearitas (*Tolerance* dan *VIF*)

Variabel	Multikoleniaritas	
	Tolerance	VIF
Desentralisasi Fiskal	0,453	2,206
Korupsi	0,453	2,206

Sumber: Data diolah, 2014

4) Hasil Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya gejala autokorelasi antara variabel-variabel independen yang berasal dari data *time series*. Uji autokorelasi dapat

dilakukan dengan Uji Durbin-Watson. Nilai tabel Durbin Watson pada $\alpha = 5\%$; $n = 12$; $k - 1 = 2$ adalah $dL = 0,8122$ dan $dU = 1,579$. Hasil pengolahan data menunjukkan nilai Durbin Watson sebesar 1,961 dan nilai tersebut berada di antara dU dan $(4-dU)$ atau 1,961 lebih besar dari 1,579 dan 1,961 lebih kecil dari 2,421. Maka dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi linier tersebut tidak terdapat autokolerasi atau tidak terjadi kolerasi di antara kesalahan pengganggu.

5) Hasil Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varian atau residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya tetap, maka disebut homokedastisitas. Hasil uji heteroskedastisitas didapatkan hasil bahwa tidak terdapat gejala heteroskedastisitas model regresi dalam penelitian ini karena seluruh nilai signifikansi yang diperoleh dari pengujian dengan metode *Glejser* diperoleh nilai α lebih dari 0,05 terhadap absolute residual (*Abs_Res*) secara parsial, sehingga layak digunakan untuk memprediksi variabel dependen sesuai dengan yang ditunjukkan pada tabel 5.

Tabel 5. Hasil Uji Heteroskedastisitas (Metode *Glejser*)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardize d Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1.527	.886		1.723	.119
Desentralisasi Fiskal	-.001	.001	-.336	-.764	.465
Korupsi	-.199	.135	-.648	-1.474	.175

Sumber : Data diolah, 2014

SIMPULAN DAN SARAN

Terdapat beberapa kesimpulan yang dapat ditarik dalam penelitian ini. Pertama, secara simultan variabel bebas yaitu Desentralisasi Fiskal dan Korupsi berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat yaitu Pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali. Hal ini dapat dilihat dari nilai F hitung yang lebih besar dari F tabel yaitu sebesar 14,318.

Kesimpulan kedua, secara parsial Desentralisasi Fiskal tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Bali. Kesimpulan ketiga, secara parsial Korupsi tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Bali.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh, maka terdapat saran yang dapat diberikan yaitu sikap untuk menghindari korupsi seharusnya ditanamkan sejak dini. Dan pencegahan korupsi dapat dimulai dari hal yang kecil.

Saran kedua yaitu Pemerintah daerah tetap perlu lebih memperbesar porsi belanja modal dibandingkan dengan belanja pegawai atau belanja barang dan jasa. Dengan perkembangan proporsi alokasi belanja modal yang semakin baik pada anggaran pengeluaran kabupaten/kota di provinsi Bengkulu, maka akan dapat mendorong keberhasilan pelaksanaan desentralisasi fiskal dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat lokal.

Adapun kelemahan dalam penelitian ini yaitu minimnya data yang tersedia sehingga penelitian ini bertentangan dengan teori yang ada.

REFERENSI

- Anggeraini Oktarida, 2012. Desentralisasi Fiskal Di Indonesia. Jurnal Volume IV No.2.
- Bird, Richard M, dan Francois Vaillancourt (penyunting). 2000. *Desentralisasi Fiskal di Negara-Negara Berkembang*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Brodjonegoro, Bambang dan Jorge Martines Vasques. 2002. *An Analysis of Indonesia's Transfer System : Recent Performance and Future Prospect*. George State University. Andrew Young School of Policy Studies. Working Paper.
- Ghozali, Imam. 2011. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS19. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hidayat, Syarif, 2005. *Too Much Too Soon; Local States Elite's Perspective on The Puzzle Of Contemporary Indonesian Regional Autonomy Policy*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Hirawan, Susiyati Bambang, 2007. *Desentralisasi Fiskal Sebagai Suatu Upaya Meningkatkan Penyediaan Layanan Publik (Bagi Orang Miskin) di Indonesia*, Pidato pada Upacara Pengukuhan sebagai Guru Besar Tetap dalam bidang Ilmu Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 24 Februari 2007, Jakarta.
- Kimberly Ann Elliott, 1999. *Korupsi dan Ekonomi Dunia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Keith Blackburn, Niloy Bose, and M. Emranul Haque, 2005. *Economic Discussion Paper EDP-0530*, The University of Manchester.
- Kuncoro, Mudrajat. 2009. *Ekonomika Indonesia; Dinamika Lingkungan Bisnis di Tengah Krisis Global*, UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Lin, Justin Yifu dan Zhiqiang Liu. 2000. Fiscal Decentralization and Economic Growth in China. *Economic Development and Cultural Change*. Chicago. Vol 49. Hal:1-21.
- Maulani, Achmad. 2010. *Korupsi dan Wajah Kusam Otonomi Daerah*. Koran Tempo, 25 November 2010.
- Manurung, Mandala. 2000. *Teori Ekonomi*. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Mauro, Paolo, 1995, Corruption and Growth, *Quarterly Journal of Economic*, 110:681-712.
- Muana, Nanga. 2005. *Makro Ekonomi Teori, Masalah dan Kebijakan*. Edisi Kedua. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Rinaldi, Taufik, Marini Purnomo dan Dewi Damayanti (2007). *Memerangi Korupsi di Indonesia yang Terdesentralisasi: studi kasus Pemerintahan Daerah*. *Bank Dunia : Justice for the Poor Project*.
- Prud'homme, Remy, 2003. Fiscal Decentralization in Africa; A Framework for Considering Reform, *Wiley InterScience Journal*, DOI; 10.1002/pad.256.

- Purwiyanti Septina Franciari, 2012. Skripsi Analisis Hubungan IPM, Kapasitas Fiskal, dan Korupsi Terhadap Kemiskinan Di Indonesia.
- Siddik, Machfud. 2002. *Format Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat Dan Daerah Yang Mengacu Pada Pencapaian Tujuan Nasional*. Makalah *ILMIAH Volume IV No.2, 2012 Anggeraini. Desentralisasi Fiskal* pada Seminar Nasional "Public Sector Scorecard". 17-18 April 2002, Jakarta.
- Sri Nawatmi, 2012. Korupsi Dan Pertumbuhan Ekonomi - Studi Empiris 33 Provinsi Di Indonesia (*Corruption and Economics Growth In 33 Province - An Empirical Study In Indonesia*). *Dinamika Akuntansi, Keuangan dan Perbankan*, Mei 2013, Hal: 66 - 81 Vol. 2, No. 1.
- Stoker, G, 1991. *The Politics of Local* Surie, H.G.1987. *Ilmu Administrasi Negara*. Terjemahan Samekto. Jakarta: Gramedia.
- Tanzi, V, 1995. Fiscal Federalism and Decentralization: *A Review of Some Efficiency and Macroeconomic Aspects*," in: Bruno, Michael, and Boris Pleskovic (eds.), *Annual World Bank Conference on Development Economics 1995*. Jurnal World Bank, Washington, D.C.
- Todaro, Michael P. dan Stephen C. Smith. 2004. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga—Edisi Kedelapan – Jilid 2*. Alih bahasa Haris Munandar. Jakarta Penerbit Erlangga.
- Wong, John D. 2004. *The Fiscal Impact of Economic Growth and Development on Local Government Capacity*. *Journal of Public Budgeting, Accounting and Financial Management*. Fall. 16.3. Hal:413 – 423.
- Zwika Neeman, M. Daniele Paserman and Avi Simhon (2008). *Jurnal Corruption and opennes. Volume 8, Issue 1. Article 50*.